

BAB II

KEHIDUPAN SOSIAL TAHANAN POLITIK SAAT BERADA DI PULAU BURU

2.1 Tahanan Politik Pulau Buru

Istilah tahanan politik atau yang kita ketahui akronimnya sebagai ‘‘tapol’’ bukan istilah yang sudah lama dikenal, justru merupakan istilah baru dalam dunia politik. Istilah tersebut muncul setelah Perang Dunia II berakhir dan dilanjutkan Perang Dingin pada tahun 1948.²¹ Pengertian istilah tahanan politik juga merujuk pada seseorang yang dipenjara atau ditahan karena melakukan kritik terhadap pemerintah negaranya atau karena perbedaan paham. Mereka yang memenuhi kriteria tersebut maka akan ditahanan dan kemudian disebut dengan nama tahanan politik.²²

Tahanan politik pada masa Orde Baru akan dikirim atau seara kasarnya dibuang ke beberapa penjara di berbagai daerah, salah satunya adalah Pulau Buru. Pulau Buru merupakan salah satu pulau yang terletak di Maluku dan menempati posisi ke-3 setelah Pulau Seram dan Pulau Halmahera sebagai pulau terbesar di Kepulauan Maluku. Pulau buru memiliki luas secara keseluruhan adalah 13.200 kilometer persegi dengan panjang 153 kilometer dan lebar 87 kilometer. Secara astronomis, Pulau Buru terletak diantara 3°3-3° 52` lintang selatan dan 125° 57`-127° 15 bujur timur.²³

²¹ I.G. Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru*. Jakarta: LP3ES, 2001, hlm. 59.

²² Longman, *Dictionary Contemporary English*. Third edition: Longman British, hlm. 114.

²³ Noersmono, *Bertahan Hidup Di Pulau Buru*. Bandung: Ultimus, 2010, hlm. 72.

Jika ditinjau dari segi geologis, Pulau Buru merupakan pulau yang penuh dengan pegunungan yang sambung menyambung dan bukit serta dipisahkan oleh sungai-sungai. Sebagian besar permukaan tanahnya bergelombang dan berombak. Pulau ini didominasi oleh hutan lebat, pegunungan dan bukit.²⁴

Sungai Wai Apo adalah sungai terpanjang dan terbesar di Pulau Buru. Sungai ini membentang dari barat (hulu) sampai timur (hilir) dan membelah dua dataran rendah Wai

Apo. Air sungai Wai Apo dimanfaatkan untuk pertanian karena mengalir sepanjang tahun. Lahan-lahan pertanian di Kecamatan Namlea adalah salah satu yang memanfaatkan air sungai Wai Apo. Dataran rendah tersebut dipilih oleh pemerintah pusat sebagai tempat rehabilitasi tahanan politik golongan B yang sejak tahun 1969 dikirim dari Pulau Jawa. Dataran rendah Wai Apo berbentuk sekop dan dikelilingi oleh pegunungan yang sambung menyambung juga dipenuhi hutan lebat. Pulau Buru yang dijadikan lokasi rehabilitasi ternyata membawa keuntungan. Terlebih ketika tahun 1979-1980 pemerintah pusat mendatangkan transmigran yang berasal dari Pulau Jawa. Pulau Buru pun menjadi lumbung padi terbesar di Maluku.²⁵

Para tahanan politik pulau Buru telah menyandang status tersebut sejak berlangsungnya penangkapan massal yang dimulai dari tahun 1965 hingga tahun 1970. Mereka yang tertangkap kemudian ditahan di Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya, Yogyakarta, dan Tangerang. Dengan demikian sebelum pemberangkatan ke Pulau Buru, mereka sudah menjalani penahanan selama empat

²⁴ Sri Moeljono, *Pembuangan Pulau Buru*. Bandung: Ultimus, 2017, hlm. 17.

²⁵ I.G. Krisnadi, *op.cit*, hlm.. 73.

tahun dan sudah hidup dengan status sebagai tahanan. Dalam masa penahanan, orang-orang tersebut harus menjalani tes psikologi yang berujung pada penggolongan tahanan dalam kategori A, B, dan C. Hukuman yang diterima didasarkan pada kategori yang mereka terima. Mereka yang termasuk Golongan B akan dipindahkan ke Pulau Buru.²⁶

Kategorisasi orang kedalam golongan B adalah melalui tes psikologi bukan melalui pembuktian pengadilan. Tahanan politik Pulau Buru semuanya berjenis kelamin laki-laki mulai dari usia 20-70 tahun. Menurut Laksamana Sudomo, terdapat 10.000 orang yang ditempatkan di Tefaak Buru. Tahanan politik golongan B yang didatangkan dari Jawa adalah sebanyak 10.000 orang. Mereka awalnya ditahan di penjara Nusakambangan sebelum pada akhirnya dipindahkan ke Pulau Buru.²⁷

Tahanan politik Golongan B dikirim dari Pulau Jawa merapat ke pelabuhan Namlea untuk kemudian dibuang ke Tefaak Pulau Buru pada tanggal 4 September 1969. Pemberangkatan ke Pulau Buru dilakukan secara rahasia atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan para tapol. Mereka tidak tahu akan dibawa kemana bahkan sejak dimasukkan ke dalam kapal. Berdasarkan keterangan dari para tahanan politik yang sebelumnya ditahan di penjara Jakarta, pemberangkatan dilakukan menggunakan transportasi kereta api tanpa jendela. Kereta tersebut melaju kearah Cilacap dan kemudian diberangkatkan ke Nusakambangan untuk digabungkan bersama tahanan lain yang nantinya akan diberangkatkan ke Pulau

²⁶ Tati Haryati, Tahanan Politik Pulau Buru Maluku (1969-1979), Jurnal Ilmiah IKIP Mataram 3(2), hlm. 685.

²⁷ Hersri Setiawan, Memoar Pulau Buru. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016, hlm. 86.

Buru.²⁸

Sejak pemberangkatan dan selama perjalanan menuju Pulau Buru, sejumlah pasukan bersenjata mengawal dan mengawasi para tapol. Pasukan tersebut juga meneror dan mengintimidasi. Salah satu bentuk intimidasi adalah mereka mengumumkan secara berulang kali bahwa para tahanan akan menetap selamanya di Pulau Buru karena para tapol tidak akan pernah dikembalikan ke daerah asal. Mereka akan berada di Pulau Buru sampai mati. Selain itu, tindakan agresif lainnya yang dilakukan oleh pasukan penjaga adalah menendang dan memukul para tapol.²⁹

Perjalanan yang jauh itu berlangsung dengan sangat buruk. Kapal yang digunakan untuk mengangkut para tapol adalah kapal yang sudah sangat tua sehingga terdapat kerusakan pada beberapa fasilitas, seperti satu dari dua toilet yang tersedia tidak dapat digunakan karena saluran pembuangan kotoran buntu. Dengan demikian sekitar 850 orang tapol yang berada di kapal tersebut harus berebut ketika ingin buang air. Bukan hanya fasilitas toilet yang amat buruk, ransum makanan juga buruk.³⁰

Pada tiga hari pertama para tapol hanya mendapat jatah sepiring nasi dengan tambahan lauk ikan asin dan sambal. Pada hari selanjutnya hingga hari terakhir, jatah yang disediakan hanya nasi putih yang digenangi air. Para tapol sudah memiliki kondisi fisik yang sangat buruk sejak keberangkatan karena diharuskan berbaris di bawah terik matahari dalam waktu yang cukup lama dengan tubuh yang telah dihujani pukulan dan tendangan. Kondisi tersebut

²⁸ I.G. Krisnadi, *loc.cit*, hlm. 8.

²⁹ Wawancara dengan Deni, tanggal 26 Februari 2023 di kediaman narasumber

³⁰ Noersmono, *op.cit*, hlm. 100.

diperparah dengan asupan makanan yang amat kurang sehingga tak sedikit yang terkulai tak berdaya.³¹

Setibanya di pelabuhan Namlea, pasukan Kodam Pattimura menyambut kedatangan para tapol dengan todongan senjata disertai pukulan dan tendangan. Selanjutnya para tapol diperintahkan untuk menaiki rakit guna menyusuri sungai Wai Apo. Setelah tiba di pos transmigrasi, mereka kembali diperintah menapaki jalan masuk ke pedalaman yang menghabiskan waktu sekitar 6 jam dengan berjalan kaki.³²

Perjalanan panjang dari Nusakambangan sampai Pulau Buru terasa sangat melelahkan bagi para tapol. Oleh sebab itu, dibutuhkan waktu untuk sekadar beristirahat sebelum memulai kehidupan di tempat tersebut. Pada nyatanya, beristirahat yang cukup dengan nyaman hanya ada dalam angan. Setibanya di Pulau Buru, para tapol diarahkan ke unit-unit yang sudah disediakan.

Terdapat 22 unit di Pulau Buru yang dibangun diatas tanah pesawahan dengan masing-masing dihuni oleh 500 sampai 1000 orang. Tiap unit merupakan satu kompleks barak yang terdiri dari 10 sampai 20 barak dengan dihuni oleh 50 orang ditiap barak. Tiap tersebut barak memiliki ukuran 9 meter x 30 meter yang membuat para tapol tidur berdesakan. Terdapat dua pintu gerbang dengan pos jaga bersenjata yang terdiri dari 30-40 tentara.³³ Adanya penjagaan yang ketat dengan tentara sebanyak itu memungkinkan para tahanan politik tidak dapat melarikan diri, bahkan merasa takut sebelum rencana pelarian tersebut dilaksanakan.

³¹ Wawancara dengan Deni, tanggal 26 Februari 2023 di kediaman narasumber

³² Sri Moeljono, *op.cit*, hlm. 44.

³³ Hersri Setiawan, *op.cit*, hlm. 90.

Tabel 2.1. Nama-nama Unit Inrehab Pulau Buru

No	Nama Unit Inrehab
1	Wanapura
2	Wanareja
3	Wanayasa
4	Savanaja
5	Wanakarta
6	Wanawangi
7	Wanasurya
8	Wanakencana
9	Wanamulya
10	Wanadharma
11	Wanaasri
12	Birawa Wanajaya
13	Giripura
14	Bantalareja
15	Indrapura
16	Indrakarya
17	Argabhakti
18	Adhipura

Sumber: I.G. Krisnadi. Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979). (Jakarta:

LP3ES, 2001).

2.2 Kehidupan Sosial Tahanan Politik di Pulau Buru

Kehidupan para tahanan politik ketika memasuki Pulau Buru terbilang sangat memprihatinkan. Kebebasan dalam segala aspek kehidupan hanya berada dalam angan yang nyaris mustahil dapat terjadi dalam realitas. Para tahanan politik tersebut hidup dalam kekangan para penguasa tefaaf. Segala aktivitas yang mereka lakukan harus sesuai dengan daftar dan jadwal yang telah ditentukan. Para tahanan politik tidak diperbolehkan melakukan aktivitas lain diluar daftar dan jadwal tersebut.

Pada pagi-pagi buta sekitar pukul 04:00 aparat sudah memanggil para tapol untuk segera bangun, berbaris di lapangan serta melakukan senam pagi. Seusai dilakukannya senam pagi, datang perintah pertama bagi para tapol yaitu membuka daerah untuk membuat jalan, namun perlengkapan yang dibutuhkan tidak disediakan sehingga para tapol bekerja dengan tangan kosong yang mengakibatkan tangan mereka terluka sehabis membat alang-alang. Para tapol mau tidak mau harus menahan rasa sakit cukup lama karena peralatan yang dibutuhkan seperti pisau, linggis, gergaji, kapan, dan shlieper tiba 10 hari kemudian.³⁴

Membuka jalur penghubung antara unit III dan pos terakhir yang dekat dengan sungai atau yang biasa disebut Pos Transkop adalah kerja paksa pertama yang harus dijalani oleh para tapol. Tujuan dari membuka jalur ini adalah memudahkan pasokan pangan sampai ke Tefaaf. Pekerjaan dimulai dengan menebang pohon, membat rumput dan mengarahkan aliran sungai yang

³⁴ Wawancara dengan Deni, tanggal 26 Februari 2023 di kediaman narasumber

menggenangi jalan setapak. Jalur penghubung itu hampir selesai, hanya tersisa setengah kilometer menuju Pos Transkop, para tapol mendapat tugas baru. Mereka diperintahkan untuk berhenti dari kegiatan yang sedang dilakukan dengan alasan rakit tidak dapat melewati jalur sungai menuju Pos Transkop. Para tahanan politik diperintahkan membuat jalur setapak sepanjang 8 km dan lebar 1,5 meter yang menghubungkan Unit III dengan Air Mandidih.³⁵

Disamping proyek pembangunan jalan, kerja paksa lainnya yang harus dilakukan oleh para tahanan politik adalah membangun pos penjagaan wisma, pos komando, barak tambahan, rumah sakit, dapur, gedung kesenian, tempat tinggal komandan, hingga pekarangan dengan menanam 26 pohon. Pembangunan fisik yang dikerjakan oleh para tahanan politik melahirkan wilayah produksi. Pulau Buru seketika berubah dari kawasan tandus tak layak huni menjadi sebuah pemukiman dengan segala fasilitasnya.³⁶

Pengubahan kawasan tandus menjadi lahan produktif membuat para tapol harus bekerja ekstra. Mereka diperintahkan untuk mencetak sawah berhektar-hektar bahkan sejak awal kedatangan di Pulau Buru. Selain itu, para tapol harus membuka ladang dan huma serta menggarapnya. Terhitung dari kedatangan para tapol hingga akhir masa penahanan pada tahun 1979 lahan pertanian yang berhasil dibuka telah mencapai 3.532,6 hektar. Jumlah tersebut tentu sesuai dengan gagasan mengisolasi tahanan politik dengan biaya serendah mungkin. Gagasan ini mendasari pengiriman para tahanan politik ke Pulau Buru.³⁷ Target utama adalah para tahanan politik Pulau Buru dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

³⁵ Hersri Setiawan, *op.cit*, hlm. 93.

³⁶ Tati, *op.cit*, hlm. 687.

³⁷ Sri Moeljono, *op.cit*, hlm. 60.

Dalam prakteknya para tapol justru harus menghidupi penguasa di unit-unit juga perekonomian wilayah. Tenaga tapol diperas memproduksi pertanian untuk konsumsi diri sendiri dan pasar. Komoditi yang diproduksi adalah sagu, kayuputih, gula, papan, dan lain-lain.³⁸ Hasil penjualan komoditi tersebut sudah dipastikan menjadi milik komandan unit dan bawahannya.

Mengubah suatu kawasan yang tandus menjadi lahan yang bisa ditanami tentu pekerjaan yang berat dan sulit. Awalnya mereka membuat saluran tempat pembuangan genangan air dan dilanjutkan dengan menebang pohon. Setelah itu, tanah dibagi menjadi petak-petak sawah yang kemudian dicangkul dan didatarkan kembali.³⁹ Dalam prosesnya, seringkali mendapati masalah, misalnya saat membuat bendungan irigasi yang gagal sampai berkali-kali karena pada dasarnya sawah yang dibuat merupakan sawah yang kering. Pekerjaan berat tersebut turut diwarnai dengan intimidasi, pukulan dan tendangan dari para aparat, sehingga nuansa yang tercipta hampir serupa dengan kerja zaman penjajahan asing.⁴⁰

Jadwal kerja para tapol telah ditetapkan di Tefaaf Pulau Buru. Mereka memulai pekerjaan dari pukul 4 pagi hingga pukul 7 malam. Pada waktu tersebut mereka hanya boleh mengerjakan pekerjaan yang sudah ditetapkan sehingga pekerjaan untuk keperluan pribadi harus dikesampingkan. Sementara diluar batas kerja yaitu pukul 19:00, para tapol harus bekerja untuk keperluan kelompok, misalnya mengumpulkan kayu bakar, mempersiapkan makan malam, membersihkan kamar mandi, membersihkan barak dan melayani aparat di

³⁸ Chairul Basrun, *Masyarakat Buru Dalam Perspektif Kontemporer (Kajian Kritis Perubahan Sosial di Kabupaten Buru)*. Palembang: Mega Utama, 2015, hlm. 33.

³⁹ *Ibid*, hlm. 34.

⁴⁰ Wawancara dengan Deni, tanggal 26 Februari 2023 di kediaman narasumber

wisma.⁴¹ Pukul 19.30 diadakan apel malam. Setelah apel malam, para tapol dibolehkan untuk menyelenggarakan acara kesenian, seperti keroncong, karawitan, ludruk, musik dangdut.⁴²

Aktivitas terakhir yang dilakukan sebelum pergi tidur diisi dengan aktivitas pribadi, seperti makan malam dan mandi. Mereka juga dilarang beristirahat selama masa kerja. Hanya ketika makan siang mereka memiliki sedikit waktu untuk beristirahat. Kerap kali para tapol masih bekerja meski batas waktu sudah habis.⁴³

Keseharian tapol tergerus oleh waktu yang dihabiskan untuk bekerja daripada waktu istirahat, sementara kerja yang dilakukan sudah menyerap hampir keseluruhan tenaga yang dimiliki. Pada beberapa kasus, tapol harus mencangkul padang sabana selama 12 jam terhitung dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 malam. Pembangunan dua gereja di unit III bahkan dapat diselesaikan dalam satu malam.⁴⁴ Terdengar hiperbola, tapi itulah kenyataannya. Pada saat-saat tersebut ketika malam hari dapat terdengar suara gergaji karena memang para tapol sedang menggergaji kayu. Pembangunan gereja tersebut dilakukan dibawah bayang-bayang bentakan dan pukulan.

Bagi sebagian besar tapol, menjalankan pekerjaan dengan ritme dan pola seperti itu sangatlah menyiksa. Beberapa dari mereka harus terkapar di rumah sakit unit selama sehari-hari. Mereka juga dilarang menambah barang pribadi demi membantu bertahan hidup. Sejak diberitahu bahwa mereka akan

⁴¹ Noersmono, *op.cit*, hlm. 115.

⁴² I.G. Krisnadi, *op.cit*, hlm. 88.

⁴³ Wawancara dengan Deni, tanggal 26 Februari 2023 di kediaman narasumber

⁴⁴ I.G. Krisnadi, *op.cit*, hlm. 89.

diberangkatkan ke Pulau Buru, para tahanan politik hanya diperbolehkan membawa dua helai pakaian saja. Dengan demikian, mereka harus memakai pakaian itu seperlunya jika tidak ingin pakaian tersebut rusak saat melakukan kerja fisik. Oleh karena itu, para tapol kerap bertelanjang bulat saat mencangkul sawah guna menyelamatkan pakaian yang dimiliki. Para tapol diperintahkan hanya memusatkan perhatian pada pekerjaan fisik, tidak boleh memiliki alat tulis dan bahan bacaan.⁴⁵

Pada titik tertentu pengerahan kerja untuk produksi pangan berhasil sukses besar. Panen padi pada saat itu menapai 80 ton.⁴⁶ Dengan jumlah ini para tapol akhirnya dapat sedikit berpesta. Mereka akhirnya dapat makan nasi setelah sekian lama hanya mengonsumsi lempengan batang aren panggang atau yang biasa disebut cabin. Sementara lauknya harus dicari sendiri oleh para tapol. Masa jaya tersebut tidak berlangsung lama karena mengalami gagal panen setelahnya. Kegagalan tersebut membawa dampak buruk untuk para tapol. Mereka tidak bisa mendapat pasokan pangan dari luar Pulau Buru. Akibatnya, terjadi tragedi kelaparan yang luar biasa. Pada masa ini banyak tapol yang mati karena kelaparan dan penyakit-penyakit kekurangan gizi. Tapol segera beralih makan sagu, binatang hingga dedaunan apapun yang mereka temukan. Sering kali mereka menyantap tikus, anjing, kucing, ular, dan kadal demi bertahan hidup. Sekalipun keberhasilan panen didapatkan kembali, para tapol tidak memiliki kuasa untuk mengontrol hasil panen sesuka hati. Mereka hanya diberi jatah sebanyak 150 kg

⁴⁵ Wawancara dengan Deni, tanggal 26 Februari 2023 di kediaman narasumber

⁴⁶ Chairul Basrun, *op.cit*, hlm. 38.

beras.⁴⁷

Pada tahun 1974 ketika dibawah pimpinan Dan Tefaaf Kolonel Samsi MS, sistem kerja diubah dari harian menjadi borongan. Para tapol dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan keahlian yang mereka miliki, misalnya kelompok pengrajin, pelukis, penggergaji, tukang bata dan genteng, tukang kayu atau mebel, pemukul sagu, penyuling kayuputih, dan sebagainya.⁴⁸ Dengan sistem kerja yang seperti itu berpengaruh pula pada sistem pengamanan di Pulau Buru yang cenderung represif dan dalam praktiknya menciptakan seribu satu peraturan.

Sistem pengamanan yang seperti itu perlu ditunjang oleh sistem operasional yang dapat melancarkan pelaksanaannya. Prajurit anggota Tonwal adalah penunjang di tingkat paling bawah, diatasnya adalah Danton (Komandan Peleton) yang berpangkat Serma (Sersan Mayor). Danton ini yang bertanggung jawab pada Dan Unit berpangkat Lettu (Letnan Satu) beserta pembantu-pembantunya. Mereka ini tidak melulu dari kalangan militer, tetapi dari urusan Saprodi (sarana produksi padi), staf gugus tugas pertanian (Gusgastan), juga dari keseharatan. Sama halnya dengan Tonwal, mereka menjalankan aturannya sendiri-sendiri dengan ancaman bagi para tapol yang melanggar.⁴⁹

Sejumlah tindakan pendisiplinan serta penghukuman telah dikenakan kepada sejumlah tahanan politik. Tindakan tersebut diberlakukan tanpa adanya

⁴⁷ Noersmono, *op.cit*, hlm. 138.

⁴⁸ I.G. Krisnadi, *op.cit*, hlm. xxxvi-xxxvii.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. xxxvii.

pantauan dan kontrol dari pihak luar.⁵⁰ Pendisiplinan serta penghukuman berlangsung dalam keadaan tertutup dan dibawah penguasaan total para aparat di Pulau Buru. Oleh karena itu, diberlakukannya tindakan pendisiplinan serta penghukuman tersebut termasuk ancaman serius hilangnya hak-hak dasar para tahanan politik.

Sejumlah aturan berawalan kata ‘dilarang’ menjadi momok menakutkan yang membelenggu para tapol. Mereka menyebut aturan tersebut konsinyes. Larangan yang termasuk konsinyes adalah larangan berbasa-basa (maksudnya saling bercakap-cakap dalam bahasa daerah), larangan saling bercakap dijam malam, larangan buang air di sungai tanpa melapor dan izin dari pengawal, larangan masuk barak lain diluar jam yang sudah ditetapkan, dan sebagainya. Semua itu dilakukan demi mencegah kemungkinan para tapol melakukan aksi perlawanan atau lebih gawat lagi melarikan diri. Aturan-aturan ini harus ditaati oleh seluruh tapol dibawah bentakan dan todongan senjata.⁵¹ Ini menyebabkan struktur kehidupan para tapol bernuansa otoriter, yang ada hanya kepatuhan mutlak. Tidak ada kata ‘bukan,’ apalagi kata ‘tidak,’ yang ada hanya ucapan ‘siap Pak!’

Banyak tapol yang dihukum karena melanggar peraturan yang ditetapkan oleh penguasa Tefaaf. Misalnya, tapol yang dianggap akan melarikan diri gara-gara menyerukan lagu Melayu Larilah Hai Kudaku!⁵² padahal bisa dikatakan itu tindakan yang normal karena menyerukan lagu tersebut bukan jaminan tahanan

⁵⁰ Leirissa, *Tilly ‘Collective Action Revolusi’ Kisah Tawanan Boven DiguL*. Jurnal SEJARAH, 6(1), hlm. 28.

⁵¹ I. G. Krisnadi, *op.cit*, hlm. xxxvii.

⁵² *Ibid*, hlm. xxxviii.

politik berniat melarikan diri.

Tahanan politik yang melanggar aturan-aturan yang telah disebutkan diatas, maka akan mendapat hukuman sebagai ganjarannya. Bentuk hukuman itu bermacam-macam, dari yang paling ringan seperti koprol, push-up, dipermak habis-habisan, dan dijemur dengan posisi kepala tengadah, hingga hukuman yang paling berat. Hukuman yang paling berat ini sampai pada level pembunuhan. Pembunuhan telah dilakukan terhadap sejumlah tahanan yang melawan atau diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Pembunuhan dilakukan tanpa adanya pembuktian terhadap kesalahannya.⁵³

Pembunuhan dalam bentuk lainnya juga terjadi, misalnya serang tapol yang tewas karena mendapat penganiayaan yang dilakukan oleh petugas secara terus-menerus. Bentuk penyiksaan yang diterima adalah bentakan, tendangan, pukulan, tamparan pipi, berondongan senapan diatas kepala atau diantara dua kaki, mrangkak selama satu malam di lapangan tempat apel, tiarap tanpa memakai busana, pengurangan jatah makanan, kurungan dalam barak tanpa diberi makan, telentang dengan muka menghadap langit, berdiri diatas satu kaki sementara kedua tangan memegang leher bagian belakang, hingga setrum listrik.⁵⁴ Penyiksaan tersebut dilakukan ketika proses interogasi dalam menggali segala informasi dari para tapol atau ketika pemanggilan tapol tetapi tapol tersebut melakukan perlawanan, maka yang terjadi selanjutnya adalah penyiksaan.

Bentuk penghukuman lainnya yang menuju pada arah pembunuhan, penyiksaan, dan penganiayaan adalah pengasingan para tapol yang dianggap

⁵³ Sri Moeljono, *op.cit*, hlm. 92.

⁵⁴ Tati, *op.cit*, hlm. 688-689.

melakukan pelanggaran berat ke Unit Jikukecil yang terletak di Desa Jikukecil Namlea. Disanalah mereka diisolasi dan disiksa hingga tak berdaya bahkan parahnya lagi sampai tewas. Pendek kata, di dalam struktur sosial komunitas tahanan Pulau Buru, penguasa Tefaaf adalah tokoh utama yang mutlak harus ditaati apapun aturan dan perintahnya.⁵⁵

Permasalahan yang dihadapi para tahanan politik Pulau Buru bukan hanya seputar penganiayaan dan penyiksaan fisik saja, tetapi juga merembet pada kehidupan seksual. Penghuni inrehab Pulau Buru yang semuanya berjenis kelamin laki-laki tentu memungkinkan hubungan homoseksual tidak dapat terhindarkan. Para tapol yang dibuang ke Pulau Buru telah diputus hubungannya dengan dunia normal yang lumrahnya dihuni oleh dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga sejumlah tapol terjebak di dimensi homoseksual. Sementara orang di kalangan komunitas tahanan politik Pulau Buru menyebut kawan mereka yang menjalin hubungan seksual sebagai orang yang menderita sakit mata. Menurut mereka, orang yang homo itu telah berkurang fungsi penglihatannya karena melihat sesama lelaki sebagai perempuan.⁵⁶

Dibalik semua hal buruk dan menyakitkan yang diterima dan dialami oleh para tapol, terdapat satu hal yang bisa dikatakan baik jika dilihat dari perspektif kemanusiaan. Hal tersebut adalah pengarahan dan pelatihan keahlian. Para tapol diarahkan dan diberi pelatihan khusus terkait suatu skill yang nantinya berguna bagi mereka ketika sudah dikembalikan pada masyarakat, seperti yang dialami dan dirasakan oleh kakek dari narasumber yang penulis wawancarai. Beliau

⁵⁵ Sri Moeljono, *op.cit*, hlm. 101.

⁵⁶ I.G. Krisnadi, *op.cit*, hlm. xxxviii

mengatakan bahwa kakeknya mendapat keahlian tusuk jari sepulangnya dari pembuangan Pulau Buru dan keahlian ini dijadikan sebagai mata pencaharian untuk menopang perekonomian ditengah diskriminasi terhadap hak bekerja mereka.⁵⁷ Kakek tersebut adalah satu dari sejumlah tapol yang pulang membawa suatu keahlian tertentu. Kiranya dari sekian hal buruk yang menjadikan kehidupan tapol gelap gulita, ada satu hal baik yang menerangi.

⁵⁷ Wawancara dengan Deni, tanggal 26 Februari 2023 di kediaman narasumber